

## **BAB I PENGANTAR**

### **A. Latar Belakang**

Bolaang Mongondow merupakan salah satu daerah di propinsi Sulawesi utara, yang memiliki luas wilayah hampir 54,5 % dari Sulawesi utara, (*hampir Setengah persen*). Tahun 2007 daerah ini menempatkan dirinya sebagai daerah induk yang mekar dan melahirkan daerah-daerah baru yakni, Kabupaten Bolaang Mongondow selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow utara, Kabupaten Bolaang Mongondow timur, Kota kotamobagu dan Bolaang Mongondow sendiri sebagai daerah induk. Hingga saat ini, Bolaang Mongondow telah menjadi empat (4) kabupaten dan satu (1) kota, (*baca : Kota kotamobagu*). Bahkan sebutan dahulu ‘daerah Bolmong’ telah berubah menjadi BMR : Bolaang Mongondow Raya, untuk mewakili daerah bolaang Mongondow secara keseluruhan. Sedangkan penamaan BMR sendiri berasal dari pengusulan daerah ini sebagai calon Propinsi baru di Indonesia.

Bolaang Mongondow pada awalnya merupakan daerah kerajaan besar yang dikuasai satu raja tunggal, (*Di masa Raja Loloda Mokoagow ; Punu’ Molantud*). Kemudian berkat strategi dan kearifan lokal, menjadi daerah Swapraja yang melahirkan empat, (4) kerajaan sebagai kekuatan besar dimasing-masing wilayahnya, yakni ; Bintauna, Bolangitang, kemudian menjadi Kaidipang besar, (*daerah-daerah ini berada didaerah Bolaang Mongondow utara sekarang*), Bolaang Uki, (*daerah Bolaang Mongondow selatan saat ini*), dan Bolmong atau ‘Mongondow, (*daerah Kotamobagu-Bolmong sekarang*). Bahkan dimasa ke’emasan-nya, Kerajaan Mongondow mempunyai kekuasaan hingga kedaerah-

daerah disekitarnya yang meliputi Bobenehu ; Manado tua sekarang, dan kerja sama politik hingga ke daerah Buol dan ternate-tidore. (*suku 'Loloda' di ternate saat ini adalah bukti sejarah kerasama Raja Mongondow Loloda' Mokoagow dengan kesultanan ternate-tidore*). Peralihan gerakan nasional dari system kerajaan ke demokrasi politik ekonomi, melahirkan paradigam baru di bangsa ini, yang berefek pada terjadi-nya gerakan-gerakan serta perubahan system politik-pemerintahan dimasing-masing daerah, termasuk di bolaang Mongondow.

Tahun 1954, secara resmi Kerajaan Bolaang Mongondow menyatakan bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia ; NKRI. Peristiwa ini merupakan gerakan heroic, yang merupakan historical-momentum (*momentum sejarah*), yang sangat mempengaruhi tatanan kehidupan politik, ekonomi, pemerintahan, sosial dan budaya masyarakat bolaang Mongondow. Bergabungnya Kerajaan 'Mongondow' dalam NKRI adalah bukti kesadaran rakyat dan tokoh-tokoh bolaang Mongondow terhadap gerakan nasional yang utuh dan adil serta kepercayaan terhadap adanya pembangunan nasional yang tanpa diskriminasi. Peristiwa ini diawali dengan gerakan besar dan pengaruh gerakan syarikat Islam di daerah-daerah tertentu di Mongondow, khusus-nya di kotamobagu yang berpusat di 'Molinow', (*Kelurahan Molinow Kecamatan Kotamobagu barat saat ini*). Gerakan ini dipimpin oleh Zakaria imban dan Adampe Dolot yang merupakan tokoh-tokoh syarikat Islam di Bolaang Mongondow.

Situasi politik-pergerakan nasional pasca-bergabung-nya daerah Bolaang Mongondow kedalam NKRI mengalami pasang surut. Pasang surut pemerintahan dan gerakan nasional tentunya merupakan instabilitas negara yang lahir dari

konstruksi gerakan internasional, meskipun kita mengetahui bersama bahwa 17 Agustus tahun 1945 bangsa Indonesia telah memproklamkan kemerdekaannya secara resmi dan terbuka, akan tetapi tahun 1950 adalah situasi berkecamuk dalam negeri terjadi karena masih adanya intervensi dari politik-militer asing yang terus melakukan kontrapionase didalam negeri.

Pasca kemerdekaan diproklamkan, situasi pemerintahan pusat adalah berfokus pada pembentukan negara yang kuat, terciptanya keadilan-persamaan serta pembentukan struktur TNI yang kuat dalam rangka mengawal negara. Perampangan dan adanya struktur yang kuat tersebut menimbulkan profokasi dan konflik kepentingan dalam rangka penciptaan keadilan di masing-masing daerah yang kemudian dideklarasikan dan kemudian gerakan-gerakan tersebut menimbulkan pro-kontra sebagai pejuang ataupun sebaliknya dikatakan sebagai *'pemberontakan-terbuka terhadap negara'*.

Situasi tersebut menjadi parah terlebih, Pemilihan Umum (PEMILU), tahun 1955 tidak berhasil menghilangkan ketidakadilan dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Di daerah muncul Dewan-dewan seperti Dewan Banteng di Sumatera Barat, Dewan Gajah di Medan, Dewan Garuda di Sumatera Selatan dan Dewan Manguni di Manado. Gerakan daerah itu kemudian berkembang menjadi gerakan terbuka yang terkenal dengan PRRI/Permesta. PRRI diproklamasikan oleh Achmad Husein tanggal 15 Februari 1958 sedangkan Permesta diproklamasikan oleh Ventje Sumual tanggal 2 Maret 1957. Para perwira yang dianggap melakukan pemberontakan dipecat dari TNI sehingga TNI mengalami reorganisasi.

PRRI/Permesta kemudian mendirikan pemerintahan tandingan dengan Mr. Syafruddin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri, pendirian pemerintah tandingan ini menimbulkan konflik bersenjata antara TNI dengan PRRI/Permesta dari tahun 1958 sampai tahun 1961. Gerakan PRRI/Permesta diketahui mendapat bantuan dari pihak Asing, terbukti dengan tertembaknya pilot kebangsaan Amerika Serikat bernama Allan Pope. Kejadian tersebut merubah sikap pemerintah Indonesia kepada Amerika Serikat. Masyumi dan PSI dua partai yang juga membantu gerakan PRRI/Permesta dibubarkan oleh Presiden Soekarno pada Agustus 1960.

Banyak yang menilai bahwa gerakan PRRI/Permesta bukan merupakan suatu pemberontakan, melainkan Konflik yang terjadi pada waktu itu sangat dipengaruhi oleh tuntutan keinginan akan adanya otonomi daerah yang lebih luas. Selain itu ultimatum yang dideklarasikan itu bukan tuntutan pembentukan negara baru maupun pemberontakan, tetapi lebih kepada konstitusi dijalankan. Pada masa bersamaan kondisi pemerintahan di Indonesia masih belum stabil pasca agresi Belanda. Hal ini juga mempengaruhi hubungan pemerintah pusat dengan daerah serta menimbulkan berbagai ketimpangan dalam pembangunan, terutama pada daerah-daerah di luar pulau Jawa.

Sebelumnya bibit-bibit konflik tersebut dapat dilihat dengan dikeluarkannya Perda No. 50 tahun 1950 tentang pembentukan wilayah otonom oleh provinsi Sumatera Tengah waktu itu yang mencakup wilayah provinsi Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, dan Jambi sekarang. Namun apa yang menjadi pertentangan ini, dianggap sebagai sebuah pemberontakan oleh

pemerintah pusat yang menganggap ultimatum itu merupakan proklamasi pemerintahan tandingan dan kemudian dipukul habis dengan pengerahan pasukan militer terbesar yang pernah tercatat di dalam sejarah militer Indonesia.

Akan tetapi beberapa pendapat para ahli baik itu berbentuk buku, tesis, jurnal dan penelitian bahwa permesta bukanlah suatu gerakan pemberontakan melainkan suatu gerakan koreksi terhadap pemerintahan pusat di Jakarta. Ini merupakan suatu dukungan dimana seakan permesta tidak pernah berbuat kesalahan melainkan memiliki substansi atau nilai yang positif dalam perjuangannya.

Pendeklarasian di Makassar pada 2 Maret 1957–kemudian menyusul pendeklarasian Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) oleh Letkol Achmad Husein di Padang pada 15 Februari 1958–bukanlah pemberontakan terhadap kedaulatan Republik Indonesia. Mungkin ini sebuah fakta lain. Dalam sejarah versi resmi pemerintah, Permesta dan PRRI diklasifikasikan sebagai sejarah hitam, gerakan pemberontakan terhadap kedaulatan Republik Indonesia. “Dari hasil penelitian saya, baik Permesta maupun PRRI itu bukan pemberontakan, sekali lagi, bukan pemberontakan,” tegas Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Padjadjaran, dalam bukunya *Memoar Ventje Sumual*, (2000: 115.)i Permesta, Ventje Sumual sepenuhnya beraktivitas di bidang ekonomi.

Terlepas dari pro-kontra gerakan-gerakan local tersebut, baik sebagai protes local maupun sebagai ‘pemberontakan terbuka’, tentunya harus dikaji secara ilmiah dan rasional-empirik. Akan tetapi peristiwa tersebut merupakan

adanya siklus yang terus bergerak dalam merefleksikan sebuah transformasi membangun Indonesia yang maju dan siap berkompetisi di lapangan internasional, dan mampu mengakomodir kepentingan pembangunan secara eksplisit hingga ke pelosok daerah-daerah di Indonesia tanpa terkecuali, sehingga pembangunan yang ada tidak bersifat sentralistik.

Bolaang Mongondow yang telah menyatakan bergabung dengan NKRI sejak tahun 1954 tanpa terkecuali merupakan bagian dari NKRI secara utuh yang mempunyai hak dan posisi yang sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, posisi Bolaang Mongondow sebagai bagian dari sejarah utuh NKRI harus senantiasa melakukan rekonstruksi sejarah dalam rangka menciptakan peradaban baru yang sistematis. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa, *‘Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah : Bung Karno.* Maka terkait PRRI/PERMESTA di Bolaang Mongondow, sudah sepantasnya jika dilacak, melalui metodologi ilmiah, sehingga akan bisa diketahui tentang situasi yang terjadi di Bolaang Mongondow dimasa itu.

Berkaitan dengan hal tersebut maka, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dalam Skripsi dengan Judul : **Bolaang Mongondow di Masa Permesta Tahun 1950.**

## **B. Ruang Lingkup Penelitian**

Pemilihan fokus penelitian ini berdasarkan pertimbangan :

1. Secara spasial penelitian ini di fokuskan di Kotamobagu ; sekarang Kota Kotamobagu, sebagai daerah pusat Bolaang Mongondow sebelum dimekarkan tahun 2007. Daerah ini merupakan pusat gerakan militer

Permesta dan juga sebagai pusat ekonomi-politik-sosial di Bolaang Mongondow. (*Jauh sebelum di mekarkan*)..

2. Secara temporal pembahasan penelitian adalah pergerakan PRRI/PERMESTA di Bolaang Mongondow pada tahun 1950.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan pokok yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kondisi sebelum pergerakan PRRI/PERMESTA di Bolaang Mongondow Tahun 1950 ?
2. Bagaimanakah pergerakan PRRI/PERMESTA di Bolaang Mongondow ?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1) Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kondisi sebelum pergerakan PRRI/PERMESTA di Bolaang Mongondow Tahun 1950.
2. Untuk mengetahui pergerakan PRRI/PERMESTA di Bolaang Mongondow.

#### 2) Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi penelitian sejarah terutama kajian sejarah lokal di kabupaten Bolaang Mongondow.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan lebih lanjut, khususnya mengenai penelitian selanjutnya yang sejenis.

### **E. Kerangka Teoritis**

Penelitian ini lebih didasarkan pada penelitian sejarah lokal yang di dalamnya menyangkut teori gerakan sosial. Pengertian Teori Gerakan Sosial adalah termasuk istilah baru dalam kamus ilmu-ilmu sosial. Meskipun demikian di lingkungan yang sudah modern seperti di Indonesia fenomena munculnya gerakan sosial bukanlah hal aneh. Misalnya ketika kenaikan tarif listrik sudah terlalu tinggi kemudian muncul nama seperti Komite Penurunan Tarif Listrik. Perlawanan atau desakan untuk mengadakan perubahan seperti itu dapat dikategorikan sebuah gerakan sosial.

Berbagai gerakan sosial dalam bentuk LSM dan Ormas bahkan Parpol yang kemudian menjamur memberikan indikasi bahwa memang dalam suasana demokratis maka masyarakat memiliki banyak prakarsa untuk mengadakan perbaikan sistem atau struktur yang cacat. Dari kasus itu dapat kita ambil semacam kesimpulan sementara bahwa gerakan sosial merupakan sebuah gerakan yang lahir dari dan atas prakarsa masyarakat dalam usaha menuntut perubahan dalam institusi, kebijakan atau struktur pemerintah. Di sini terlihat tuntutan perubahan itu biasanya karena kebijakan pemerintah tidak sesuai lagi dengan konteks masyarakat yang ada atau kebijakan itu bertentangan dengan kehendak sebagian rakyat. Karena gerakan sosial itu lahir dari masyarakat maka kekurangan apapun di tubuh pemerintah menjadi sorotannya.



Jika tuntutan itu tidak dipenuhi maka gerakan sosial yang sifatnya menuntut perubahan insitusi, pejabat atau kebijakan akan berakhir dengan terpenuhinya permintaan gerakan sosial. Sebaliknya jika gerakan sosial itu bernafaskan ideologi, maka tak terbatas pada perubahan institusional tapi lebih jauh dari itu yakni perubahan yang mendasar berupa perbaikan dalam pemikiran dan kebijakan dasar pemerintah. Namun dari literatur definisi tentang gerakan sosial ada pula yang mengartikan sebagai sebuah gerakan yang anti pemerintah dan juga pro pemerintah. Ini berarti tidak selalu gerakan sosial itu muncul dari masyarakat tapi bisa pula hasil rekayasa para pejabat pemerintah atau penguasa. Jika definisi digunakan maka gerakan sosial tidak terbatas pada sebuah gerakan yang lahir dari masyarakat yang menginginkan perubahan pemerintah tapi juga gerakan yang berusaha mempertahankan kemauannya. Jika ini memang ada maka betapa relatifnya makna gerakan sosial itu sebab tidak selalu mencerminkan sebuah gerakan murni dari masyarakat.<sup>1</sup>

Kebanyakan para teoritis sosial sepakat bahwa mode aksi kolektif ini melibatkan tipe relasi yang secara sosial mengandung konflik. Tipe klasiknya adalah gerakan buruh yang menandai masyarakat industry di abad ke-19 dan awal abad ke-20.

Para sarjana berbeda pendapat mengenai apa itu gerakan sosial dan bagaimana kita mempelajarinya. Beberapa sarjana menekankan aspek organisasi dan tujuan dari gerakan- gerakan sosial. Michael Useem, misalnya,

---

<sup>1</sup> The Wahid Institute, Gerakan Sosial Baru Di Indonesia, 2006.  
<<http://thewahidinstitute.com/seeding-plural-and-peachful-islam>. akses : 7 januari 2016

mendefinisikan gerakan sosial sebagai tindakan kolektif terorganisasi, yang dimaksudkan untuk mengadakan perubahan sosial. John McCarthy dan Mayer Zald melangkah lebih rinci, dengan mendefinisikan gerakan sosial sebagai upaya terorganisasi untuk mengadakan perubahan di dalam distribusi hal-hal apa pun yang bernilai secara sosial. Sedang Charles Tilly menambahkan corak perseteruan (contentious) atau perlawanan di dalam interaksi antara gerakan sosial dan lawan-lawannya. Dalam definisinya, gerakan-gerakan sosial adalah upaya-upaya mengadakan perubahan lewat interaksi yang mengandung perseteruan dan berkelanjutan di antara warganegara dan negara.<sup>2</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gerakan sosial adalah tindakan atau agitasi terencana yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat yang disertai program terencana dan ditujukan pada suatu perubahan atau sebagai gerakan perlawanan untuk melestarikan pola-pola dan lembaga masyarakat yang ada.<sup>3</sup>

Perlawanan atau desakan untuk mengadakan perubahan dapat dikategorikan sebuah Gerakan Sosial. Gerakan sosial lahir dari situasi yang dihadapi masyarakat karena adanya ketidakadilan dan sikap sewenang-wenang terhadap rakyat. Dengan kata lain, gerakan sosial lahir sebagai reaksi terhadap sesuatu yang tidak diinginkan rakyat atau menginginkan perubahan kebijakan karena dinilai tidak adil. Berbagai gerakan sosial dalam bentuk LSM, Parpol dan Ormas yang kemudian menjamur memberikan indikasi bahwa dalam suasana

---

<sup>2</sup> Astrid S Susanto-Sunarto, Masyarakat Indonesia Memasuki Abad Ke Dua Puluh Satu, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998, Hal.21.

<sup>3</sup> [http://globalisasi.wordpress.com/2006/07/10/Gerakan-Sosial: Kajian Teoritis](http://globalisasi.wordpress.com/2006/07/10/Gerakan-Sosial-Kajian-Teoritis), Hal. 3-4.

demokratis, masyarakat memiliki banyak prakarsa untuk mengadakan perbaikan sistem atau struktur yang cacat.

Gerakan Sosial secara teoritis merupakan sebuah gerakan yang lahir dari dan atas prakarsa masyarakat dalam usaha menuntut perubahan dalam institusi, kebijakan atau struktur pemerintah. Di sini terlihat tuntutan perubahan itu biasanya karena kebijakan pemerintah tidak sesuai lagi dengan konteks masyarakat yang ada atau kebijakan itu bertentangan dengan kehendak sebagian rakyat. Karena gerakan sosial lahir dari masyarakat maka kekurangan apapun ditubuh pemerintah menjadi sorotannya. Dari literatur definisi tentang gerakan sosial, adapula yang mengartikan gerakan sosial sebagai sebuah gerakan yang anti pemerintah dan juga pro pemerintah. Ini berarti tidak selalu gerakan sosial itu muncul dari masyarakat tapi bisa juga hasil rekayasa para pejabat pemerintah atau penguasa.<sup>4</sup>

Jurgen Habermas, sebagaimana dikutip oleh Pasuk Phongpaichit (2004) menyatakan bahwa Gerakan Sosial adalah Defensive relations to defend the publik and private sphere of individuals againsts the inroad of the state system and market economy. (Gerakan Sosial adalah hubungan defensive individu- individu untuk melindungi ruang publik dan private mereka dengan melawan serbuan dari sistem negara dan pasar).<sup>5</sup>

Anthony Giddens menyatakan Gerakan Sosial sebagai upaya kolektif untuk mengejar kepentingan bersama atau gerakan mencapai tujuan bersama atau gerakan bersama melalui tindakan kolektif (action collective) diluar

---

<sup>4</sup> Juwono Sudarsono (ed), Pembangunan Politik Dan Perubahan Politik, Jakarta: Gramedia, 1976, Hal. 24-25.

<sup>5</sup> <http://pioner.netserv.chula.ac.th/~ppasuk/theorysocmovt.doc>.

ruang lingkup lembaga- lembaga yang mapan.<sup>6</sup> Sedangkan Mansoer Fakhri menyatakan bahwa Gerakan Sosial dapat diartikan sebagai kelompok yang terorganisir secara tidak ketat dalam rangka tujuan sosial terutama dalam usaha merubah struktur maupun nilai sosial.<sup>7</sup>

Sejalan dengan pengertian Gerakan Sosial di atas, Herbert Blumer merumuskan Gerakan Sosial sebagai sejumlah besar orang yang bertindak bersama atas nama sejumlah tujuan atau gagasan. Robert Misel dalam bukunya yang berjudul Teori Pergerakan Sosial mendefinisikan Gerakan Sosial sebagai seperangkat keyakinan dan tindakan yang tak terlembaga yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk memajukan atau menghalangi perubahan dalam masyarakat.<sup>8</sup>

Tetapi, David Meyer dan Sidney Tarrow, dalam karya mereka *Social Movement Society* (1998). Memasukkan semua ciri yang sudah disebutkan di atas dan mengajukan sebuah definisi yang lebih inklusif tentang Gerakan sosial, yakni: Tantangan-tantangan bersama, yang didasarkan atas tujuan dan solidaritas bersama, dalam interaksi yang berkelanjutan dengan kelompok elite, saingan atau musuh, dan pemegang otoritas.<sup>9</sup>

Dua fitur tampil menonjol dalam definisi ini. Pertama, gerakan-gerakan sosial melibatkan “tantangan kolektif”, yakni upaya-upaya terorganisasi

---

<sup>6</sup> Fadhillah Putra dkk, *Gerakan Sosial, Konsep, Strategi, Aktor, Hambatan Dan Tantangan Gerakan Sosial Di Indonesia*, Malang : PlaCID's dan Averroes Press, 2006, Hal.1

<sup>7</sup> Mansoer Fakhri, *Tiada Transformasi Tanpa Gerakan Sosial*, dalam Zaiyardam Zubir, *Radikalisme Kaum Terpinggir : Studi Tentang Ideologi, Isu, Strategi Dan Dampak Gerakan*, Yogyakarta : Insist Press, 2002, Hal. Xxvii.

<sup>8</sup> Robert Misel, *Teori Pergerakan Sosial*, Yogyakarta : Resist Book, 2004, Hal.6-7.

<sup>9</sup> David Meyer dan Sidney Tarrow. *The Social Movement Society*. 1998. <<http://www.socialmovement.com//social-movement-society/> akses 15 Januari 2016

untuk mengadakan perubahan di dalam aransemen-aransemen kelembagaan. Tantangan-tantangan ini bisa berpusat kepada kebijakan-kebijakan publik atau ditujukan untuk mengawali perubahan yang lebih luas dalam struktur lembaga-lembaga sosial dan politik, distribusi jaminan sosial, atau bisa juga menyangkut konseptualisasi mengenai hak-hak dan tanggung jawab sosial dan politik. Sedangkan Fitur yang kedua adalah corak politis yang inheren di dalam gerakan-gerakan sosial. Ini terutama terkait dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai lewat Gerakan-Gerakan sosial, yang secara tipikal mencakup perubahan di dalam distribusi kekuasaan dan wewenang. Tujuan-tujuan politis ini hanya mungkin dicapai lewat interaksi- interaksi yang terus-menerus, berkelanjutan, dengan aktor-aktor politik di luar Gerakan, yang terpenting di antaranya adalah sekutu-sekutu dan pesaing-pesaing politik dan pemegang otoritas kekuasaan.

Denny JA menyatakan adanya tiga kondisi yang lahirnya Gerakan Sosial, yang Pertama, Gerakan Sosial dilahirkan dengan kondisi yang memberikan kesempatan bagi gerakan itu. Pemerintahan yang moderat misalnya, memberikan kesempatan yang lebih besar bagi timbulnya Gerakan Sosial ketimbang pemerintahan yang sangat otoriter. Kedua, Gerakan Sosial timbul karena meluasnya ketidakpuasan atas situasi yang ada. Perubahan dari masyarakat Tradisonal ke masyarakat modern misalnya, akan menimbulkan kesenjangan ekonomi yang semakin meluas antara si kaya dan si miskin.

Perubahan ini juga dapat menyebabkan kritis identitas dan luntarnya nilai-nilai sosial yang selama ini di agungkan. Perubahan itu akan menimbulkan gejala yang dirugikan dan kemudian meluas menjadi Gerakan Sosial. Ketiga,

Gerakan Sosial semata-mata masalah kemampuan kepemimpinan dari tokoh penggerak. Sang tokoh penggerak akan menjadi inspirator, membuat jaringan, membangun organisasi yang menyebabkan sekelompok orang termotivasi untuk terlibat dalam Gerakan tersebut.<sup>10</sup>

Indikasi awal untuk menangkap gejala gerakan sosial menurut John Lofland adalah dengan mengenali terjadinya perubahan-perubahan pada semua elemen arena publik dan ditandai oleh kua litas "aliran" atau "gelombang". Dalam prakteknya suatu Gerakan Sosial dapat diketahui terutama lewat banyak organisasi baru yang terbentuk, bertambahnya jumlah anggota pada suatu organisasi gerakan dan semakin banyaknya aksi kekerasan atau protes terencana dan tak terencana.

Selain itu menurut Lofland dua aspek empiris gelombang yang perlu diperhatikan adalah, Pertama, aliran tersebut cenderung berumur pendek antara lima sampai delapan tahun. Jika telah melewati kurun waktu itu gerakan akan melemah dan meskipun masih ada akan tetapi gerakan telah mengalami proses 'cooled down'. Kedua, banyak organisasi kekerasan atau protes yang berubah menjadi Gerakan Sosial atau setidaknya bagian dari gerakan-gerakan yang disebut diatas. Organisasi-organisasi ini selalu berupaya menciptakan Gerakan Sosial - atau jika organisasinya memiliki teori operasi yang berbeda maka mereka akan dengan sabar menunggu pergeseran struktur makro yang akan terjadi (misalnya krisis kapitalisme) atau pertarungan yang akan terjadi antara yang baik dan jahat,

---

<sup>10</sup> Noer Fauzi, Memahami Gerakan-Gerakan Rakyat Dunia Ketiga, Yogyakarta : Insist Press ,2005, Hal.21.

atau kedua hal tersebut, serta menunggu kegagalan fungsi lembaga sentral. Kala itulah gerakan itu bisa dikenali sebagai gerakan pinggiran, gerakan awal dan embrio gerakan.<sup>11</sup>

Lebih lanjut dapat dirumuskan bahwa sebuah Gerakan Sosial terdiri dari:

1. Lahirnya kekerasan atau protes baru dengan semangat muda yang dibentuk secara Independen.
2. Bertambahnya jumlah (dan peserta) aksi kekerasan dan/atau protes terencana dan tak terencana (terutama kumpulan) secara cepat.
3. Kebangkitan opini massa
4. Semua yang ditujukan kepada oknum lembaga sentral
5. Sebagai bentuk usaha untuk melahirkan perubahan pada struktur dari lembaga- lembaga sentral.

Memahami dan menjelaskan fenomena Gerakan Sosial, para ahli ilmu sosial tersebut mengembangkan wacana sehingga pada tatanan teoritis telah melahirkan beberapa pendekatan untuk bisa lebih menjelaskan Gerakan Sosial. Paradigma teoritis dari Gerakan Sosial mungkin bisa dimasukkan dalam istilah yang berbeda-beda. Selain paradigma NEO- Marxisme, Pendekatan yang mendominasi hingga awal tahun 1970-an adalah konsep perilaku kolektif interaksionis dan konsep gerakan sosial mahzab Chicago, serta model struktural-fungsional. Paradigma yang terakhir ini merupakan perspektif yang paling luas dianut pada saat itu.

---

<sup>11</sup> Lofland, Protes, Studi Tentang Gerakan Sosial, Yogyakarta : Insist Pers, 2003, Hal.50.

## F. Tinjauan Pustaka dan Sumber

Adanya sumber tentunya sangat berpengaruh terhadap proses historiografi karena tidaklah mungkin kita merekonstruksi sebuah sejarah apabila bahan – bahannya (sumber) tidak tersedia. Kalaupun bisa, mungkin rekonstruksi itu tidak akan utuh dan kokoh. Pentingnya sebuah sumber ini dibuktikan dengan metode sejarah yang menempatkannya pada tahap pertama penelitian sejarah atau lebih kita kenal dengan heuristik.

Pada penelitian sejarah ini, penulis mencoba menggali sumber yang terdiri dari :Buku – buku, Skripsi, Tesis, Desertasi maupun majalah - majalah yang terkait. Arsip baik itu dari ANRI maupun dari arsip tingkatan Kabupaten, Provinsi, maupun Pusat. Sejarah lisan yang tentunya melibatkan para pelaku – pelaku sejarah. Sejarah lisan memberikan sarana untuk rekonstruksi masa lalu yang lebih realistik dan berimbang, memungkinkan munculnya sosok – sosok pahlawan tidak saja dari kalangan pemimpin tetapi juga dari rakyat yang tidak dikenal. Sejarah menjadi lebih demokratis, memanusiakan manusia<sup>12</sup>.

Adapun beberapa karya yang dapat di jadikan sumber dalam penelitian ini antara lain :

Pertama, buku yang di tulis oleh Barbara Harvei Permesta/Pemberontakan Setengah Hati. Buku ini membahas tentang Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (biasa disingkat dengan PRRI) merupakan salah satu gerakan pertentangan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat (Jakarta) yang dideklarasikan pada tanggal 15 Februari 1958 dengan keluarnya ultimatum dari

---

<sup>12</sup> Paul Thompson (2012), “Teori dan Metode Sejarah Lisan”. Yogyakarta.



*Dewan Perjuangan* yang dipimpin waktu itu oleh Letnan Kolonel Achmad Husein di kota Padang, provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kemudian gerakan ini mendapat sambutan dari wilayah Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah, dimana pada tanggal 17 Februari 1958 kawasan tersebut menyatakan mendukung PRRI. Konflik yang terjadi ini sangat dipengaruhi oleh tuntutan keinginan akan adanya otonomi daerah yang lebih luas. Selain itu ultimatum yang dideklarasikan itu bukan tuntutan pembentukan negara baru maupun pemberontakan, tetapi lebih kepada konstitusi dijalankan. Pada masa bersamaan kondisi pemerintahan di Indonesia masih belum stabil pasca agresi Belanda, hal ini juga memengaruhi hubungan pemerintah pusat dengan daerah serta menimbulkan berbagai ketimpangan dalam pembangunan, terutama pada daerah-daerah di luar pulau Jawa. Pembubaran TT-VII dan KoDPSST pada bulan Juni 1957 telah meredakan situasi tegang yang meliputi Makassar semenjak pengumuman undang-undang keadaan darurat pada tanggal 2 Maret. Walaupun bagian terbesar para perwira Sulawesi Selatan puas dengan persetujuan Juni serta pengakuan atas KDM-SST. Terdapat oposisi dari pihak perwira Minahasa terhadap pembagian Indonesia Timur kedalam komando-komando daerah yang di kordinasikan dengan pusat MBAD. Di Sulawesi Utara, khususnya Minahasa, rasa tidak puas kepada kebijaksanaan pemerintah pusat meledak pada tahun 1956 dalam pengambilalihan yayasan kopra dan banjir protes terhadap penutupan pelabuhan Bitung. Tuntutan untuk mendapatkan otonomi daerah di Sulawesi Utara digabung dengan agitasi untuk memecah pulau tersebut menjadi dua propinsi. Orang Minahasa, kelompok politik yang dominan mendukung pembagian menjadi dua Propinsi dengan batas-

batas keresidenan Belanda, yang akan mencakup Sulawesi Tengah yaitu Gorontalo dan Minahasa, dan akan merupakan satu Provinsi dengan Manado sebagai Ibu Kotanya.

Kedua, buku yang di tulis oleh Phill M Sulu.2011. Permesta Dalam Romantika, Kemelut, & Misteri . Buku ini membahas tentang sela-sela fakta sejarah, peristiwa spektakuler setengah abad lalu itu menyimpan banyak hal yang terkait dengan perjuangan Permesta itu yang hingga kini masih misterius dan dipertanyakan banyak kalangan. Untuk menyingkap keadaan sebenarnya, diperlukan penggalian lebih jauh, untuk mendekati kesimpulan pada keadaan yang sebenarnya. Kisah yang sangat misterius pada masa pergolakan Permesta di Sulawesi Utara, misalnya, adalah kematian Kolonel J.F.Warouw. Wakil Perdana Menteri PRRI/Permesta itu dikabarkan mati secara mengenaskan akibat pengkhianatan kawan seperjuangan, sebagai puncak dari konflik internal para pemimpin Permesta. Dan juga terkait konversi PRRI/Permesta ke RPI (Republik Persatuan Indonesia). Hingga kini kedua isu tersebut belum menemukan titik terang. Oleh sebab itulah, latar belakang konflik di antara pimpinan Permesta, yang dianggap merupakan faktor utama kelemahan Permesta, patut ditelusuri agar mendapat titik terang. Buku ini berkisah tentang peristiwa penting itu dari perspektif individu pelaku..

## **G. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian ini tentunya memakai metode penelitian sejarah yang terdiri langkah – langkah sebagai berikut :

### **1. Heuristik**

Heuristik merupakan tahap pengumpulan sumber dimana seorang peneliti sudah mulai secara aktual turun meneliti dilapangan. Pada tahap ini kemampuan teori – teori yang bersifat deduktif-spekulatif yang dituangkan dalam proposal penelitian mulai diuji secara induktif-empirik atau pragmatik<sup>13</sup>. Tahap heuristik ini banyak menyita waktu, biaya, tenaga, pikiran, dan juga perasaan. Ketika kita mencari sumber dan berhasil menemukannya akan terasa seperti menemukan “tambang emas”. Tetapi apabila keadaan sebaliknya, maka kita akan frustrasi. Sehingga itu agar dapat mengatasi masalah kesulitan sumber, maka kita harus menggunakan strategi untuk dapat mengatur segala sesuatunya baik mengenai biaya maupun waktu<sup>14</sup>.

Pada tahap ini, penulis akan mulai dengan mencari sumber – sumber seperti yang telah dijelaskan pada poin tinjauan pustaka dan sumber. Penulis akan berusaha untuk mengidentifikasi sumber – sumber primer seperti arsip baik ditingkatan kabupaten, provinsi, ataupun pusat. Menurut metodologi sejarah, sumber berupa arsip merupakan sumber yang menempati posisi tertinggi dibandingkan dengan posisi yang lainnya (sumber primer) karena arsip diciptakan pada waktu yang bersamaan dengan kejadian. Namun bukan berarti sumber yang

---

<sup>13</sup> Daliman (2012), "Metode Penelitian Sejarah", Yogyakarta; OMBAK. Hal 51.

<sup>14</sup> Helius Sjamsudin (2012), "Metodologi Sejarah", Yogyakarta; OMBAK. Hal 68.

lainnya tidak berguna sama sekali. Sumber – sumber yang lainnya merupakan pelengkap sekaligus penopang dalam bangunan rekonstruksi sejarah.

## **2. Kritik Sumber,**

Kritik Sumber ini adalah langkah selanjutnya setelah langkah pengumpulan sumber dilakukan. Kritik sumber adalah upaya untuk mendapatkan otentisitas dan kredibilitas sumber dengan cara melakukan kritik. Kritik dilakukan dengan memakai kerja intelektual dan rasional dan mengikuti metodologi sejarah guna mendapatkan obyektifitas suatu kejadian<sup>15</sup>. Selanjutnya kritik sumber itu terdiri dari kritik eksternal yang mengarah pada relasi antar sumber, dan kritik internal yang mengacu pada kredibilitas sumber<sup>16</sup>.

Setelah mengumpulkan sumber – sumber yang telah dijelaskan diatas, selanjutnya penulis akan melakukan kritik seperti yang dijelaskan diatas. Melakukan tahap penyeleksian sumber dengan pertimbangan yang berasal dari dalam dan luar sumber itu sendiri.

## **3. Interpretasi**

Interpretasi, merupakan penafsiran atau pemberian makna oleh sejarawan terhadap fakta – fakta (*Fact*) dan bukti – bukti (*Evidences*). Dalam metodologi penelitian sejarah, tahap interpretasi inilah yang memegang peranan penting dalam mengeksplanasikan sejarah. Sumber – sumber sejarah tidak akan bisa berbicara tanpa ijin dari sejarawan<sup>17</sup>.

## **4. Historiografi**

---

<sup>15</sup> L.Gottschalk (1956), G.J.Garraghan (1957) dan J.Tosh (1985) dalam Suhartono W. Pranoto (2010), “Teori dan Metodologi Sejarah”, Yogyakarta; Graha Ilmu. Hal 35.

<sup>16</sup> Ibid hal 36 – 37.

<sup>17</sup> Daliman, “Metodologi Penelitian”, Op.Cit., hal 81 – 82.

Historiografi, ini merupakan tahap terakhir dari penelitian sejarah, dimana semua sumber yang telah menjadi fakta setelah melalui kritik, kini dieksplanasikan dengan interpretasi penulis menjadi historiografi yang naratif, deskriptif, maupun analisis. Prof. A. Daliman mengatakan bahwa penulisan sejarah (historiografi) menjadi sarana mengkomunikasikan hasil – hasil penelitian yang diungkap, diuji (verifikasi) dan interpretasi. Rekonstruksi akan menjadi eksis apabila hasil – hasil pendirian tersebut ditulis<sup>18</sup>.

Dalam tulisan ini, bentuk penjelasan atau eksplanasi disajikan tidak hanya dalam bentuk narasi, melainkan dalam bentuk analisis secara mendalam. Ini disebabkan karena penulisan ini menggunakan pendekatan ilmu politik, sosiologi, dan agama, dengan berbagai teorinya yang dapat membantu dalam menganalisis sebuah peristiwa bersejarah.

Penjelasan tentang metodologi sejarah yang dipakai penulis diatas hanyalah bersifat teoritis, efektif tidaknya implementasi dari metodologi sejarah diatas akan sangat terlihat pada hasil penelitian dan penulisan sejarah.

Satu hal penting lagi menurut penulis adalah mengkoreksi tulisan. Menurut W.K.Storey sebelum menyajikan hasil penelitian sejarah, alangkah baiknya baca kembali dan lakukan koreksi terhadap draf final dan tanda baca dari hasil tulisan itu. Membaca dan mengoreksi adalah bagian yang penting dalam penulisan sejarah dan membutuhkan waktu dan kesabaran<sup>19</sup>.

---

<sup>18</sup> A. Daliman, *Op.Cit.*, hal 99.

<sup>19</sup> W.K.Storey (2011), ed., “Menulis Sejarah Panduan Untuk Mahasiswa”, Yogyakarta; Pustaka Pelajar. Hal 179. Buku ini adalah edisi ke 2 dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Abdillah Halim.

## H. Sistematika Penulisan

Penyajian dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu : pengantar, hasil penelitian dan kesimpulan. Agar lebih terarahnya penulisan ini, maka perlu mencantumkan sistematika penulisan sebagai berikut:

**Bab pertama** merupakan pendahuluan yang meliputi : Latar Belakang , Ruang Lingkup Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis , Tinjauan Pustaka dan Sumber , Metodologi Penelitian , Sistematika Penulisan.

**Bab dua** membahas tentang gambaran umum masyarakat dan keadaan kabupaten Bolaang Mongondow itu sendiri.

**Bab tiga** akan menguraikan kondisi sebelum pergerakan PRRI/PERMESTA di Bolaang Mongondow Tahun 1950.

**Bab empat** akan membahas tentang Bolaang Mongondow di masa Permesta Tahun 1950. Dalam hal ini akan dijelaskan secara rinci bagaimana situasi keadaan Bolaang Mongondow di masa Permesta Tahun 1950, awal masuknya Permesta di Bolaang Mongondow dan pergerakan PRRI/PERMESTA itu sendiri.

**Bab lima** merupakan bab penutup, bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban pokok permasalahan yang dikaji dan berisi saran-saran yang berguna untuk penelitian selanjutnya.